

**PELAKSANAAN PERAN TPD (TENAGA PENGGERAK DESA)
DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN ALAT REPRODUKSI
PASANGAN USIA SUBUR DI DESA PANANJUNG
KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN**

DINI YULIANI

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan peranan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya peningkatan kesehatan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. diindikasikan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan penguasaan yang kurang dikuasai secara maksimal dan tingkat sosialisasi yang masih dapat dikatakan.

Tehnik pengambilan sampel yang digunakan rumus slovin dengan tehnik probability sampling diperoleh sampel sebanyak 11 orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara dan observasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dengan dari informan. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan sebagai berikut : Pertama Peranan Tenaga Penggerak Desa dari hasil wawancara bahwa keterlaksanaan pedoman pelaksanaan kerja, pembagian kerja yang efektif, pelaksanaan sosialisasi koordinasi dan adanya kerjasama dengan stakeholder dapat dilaksanakan masih kurang maksimal. Kedua hambatan yang ditemui dalam peranan Tenaga Penggerak Desa adalah masih lemahnya pendelegasian wewenang pimpinan kepada pelaksana, masih kurang efektifnya jalinan komunikasi antara pimpinan dan pelaksana di lapangan, tingkat kedisiplinan Tenaga Penggerak Desa yang kurang baik, serta minimnya inovasi kebijakan. Ketiga untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Tenaga Penggerak Desa dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara aktif baik terhadap pegawai maupun stakeholder lain sebagai salah satu upaya untuk mengintensifkan pola kerja Tenaga Penggerak Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : *Tenaga Penggerak Desa (TPD), Kesehatan Alat Reproduksi, Pasangan Usia Subur*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan kemampuan mengembangkan sumber daya alam laksana deret hitung, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan manusia laksana deret ukur, sehingga

pada suatu titik sumber daya alam tidak mampu menampung pertumbuhan manusia yang sangat cepat sekali. Diharapkan setiap keluarga memperhatikan dan merencanakan jumlah keluarga yang diinginkan

berkenaan dengan hal tersebut. Paradigma baru program KKB nasional telah diubah visinya dari mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) menjadi "Keluarga Berkualitas 2015" untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas adalah keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Program KKB adalah salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini salah satu tujuannya adalah penjarangan kehamilan menggunakan metode kontrasepsi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan penjarangan penduduk. Program kependudukan dan KB merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM ini salah satunya dapat dilakukan melalui program peningkatan kapasitas dan keterampilan para pengelola program kependudukan dan KB, termasuk di dalamnya Tenaga Penggerak Desa di BKKBN Kabupaten Pangandaran.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan perluasan jangkauan dengan mendorong pasangan usia subur memakai metoda kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Pangandaran. Penggarapan KB di wilayah Pangandaran sifatnya wajib karena memberikan keadilan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat khususnya di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Kegiatan program KKB di wilayah Pangandaran memerlukan dukungan berbagai pihak. Oleh karenanya, BKKBN selalu bermitra dengan menggandeng berbagai elemen baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, organisasi profesi, akademis, tokoh masyarakat, tokoh agama yang mempunyai komitmen tinggi terhadap program KKB. Ini dimaksudkan dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan.

Namun sebagaimana hal tersebut di atas, bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) khususnya berkenaan dengan mendorong pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan masih rendah. Hal ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat sebagai berikut :

TABEL 1
TARGET DAN REALISASI PENGGUNAAN ALAT REPRODUKSI
DI DESA PANANJUNG BULAN SEPTEMBER - OKTOBER 2014

No	Indikator	Bulan			
		September		Oktober	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PB Non Hormonal				
	- IUD	220	152	250	142
	- MOW	156	175	175	160

	- MOP	186	166	200	146
	- Kondom	176	132	190	144
2	PB Hormonal				
	- Implant	24	20	30	15
	- Suntik	136	120	150	132
	- Pil	108	96	125	111
Presentase		73,96 %		65,45 %	

Sumber : BKKBN Kabupaten Pangandaran, 2014.

Dari sebagaimana tabel di atas, dapat digambarkan bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) oleh TPD (Tenaga Penggerak Desa) di Desa Pananjung Kabupaten Pangandaran berkaitan dengan perluasan jangkauan dengan mendorong pasangan usia subur memakai metoda kontrasepsi jangka panjang masih dikatakan kurang maksimal karena indeks ketercapaian dari hasil pelaksanaan kerja cenderung menurun yakni dari 73,96% menjadi 65,45%.

Hal tersebut di atas, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan gejala-gejala bahwa pelaksanaan peran Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya peningkatan kesehatan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, dapat dilihat pada indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kompetensi pelaksana di lapangan dapat dikatakan masih rendah. Hal ini diindikasikan dengan tingkat pemahaman dan penguasaan yang kurang dikuasai secara maksimal.
2. Tingkat sosialisasi yang masih dapat dikatakan rendah. Ditandai dengan tidak jelasnya dan tidak berkelanjutan tentang jadwal pemberian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik

untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan kerja Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam pelaksanaan kerjanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan Peranan TPD (Tenaga Penggerak Desa) Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Alat Reproduksi Pasangan Usia Subur Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?; 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peranan TPD (Tenaga Penggerak Desa) dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peranan TPD (Tenaga Penggerak Desa) di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ?

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Soekamto (2001:5) sebagai berikut :

Suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat,

peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peranan yang sebagai bentuk perilaku seseorang akan menyebabkan seseorang dalam melakukan tindakan menjadi terbatas sesuai dengan status dimana peranan itu difungsikan. Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau pergaulan dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu menurut Soekanto (2001:23) menyebutkan bahwa peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran juga diartikan suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat sebagai organisasi.

2. Tenaga Penggerak Desa (TPD)

Sebagai Tenaga Penggerak Desa merupakan sebuah keharusan untuk memahami ilmu, wawasan dan pengetahuan tentang Tugas dan Fungsi Tenaga Penggerak Desa sehingga dalam melaksanakan program KB dan kependudukan mereka mempunyai pengetahuan yang cukup dan kemampuan yang baik dalam melakukan pekerjaannya dilapangan. Selain itu Tenaga Penggerak Desa dituntut untuk lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam melakukan penggerakan dan pengembangan Program KB di lapangan sehingga keberhasilan program KB dapat dicapai. Tugas Tenaga Penggerak Desa (TPD) hampir

sama dengan PKB/PLKB dalam operasional program KB di tingkat desa. Adapun tugas Tenaga Penggerak Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- b. Melaksanakan/Membantu Kegiatan Pelayanan
- c. Pembinaan dalam Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- d. Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja(PKBR)
- e. Program ketahanan/Bina Keluarga
- f. Pengembangan Ekonomi keluarga
- g. Pencatatan dan Pelaporan

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalahusia remaja yang berada kategori umur 7 – 15 tahun yang tidak melanjutkan sekolah di Desa Pananjung berdasarkan data dari Mutasi Data Keluarga (MDK) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Pangandaran pada tahun 2014 yaitu sebanyak 222 orang. Tehnik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu dengan teknik *probability sampling*. Dengan menggunakan rumus slovin dalam mencari sampel diperoleh sampel sebanyak 11 informan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) adalah :

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan peranan TPD (Tenaga Penggerak Desa) dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi adalah cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai pelaksanaan peranan TPD (Tenaga Penggerak Desa) dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden.
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data-data yang diperoleh pada objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil penelitian dan pembahasan berkenaan dengan peranan TPD (Tenaga Penggerak Desa) dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1) Pelaksanaan peranan TPD (Tenaga Penggerak Desa) dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Kemampuan pegawai dalam pelaksanaan efektivitas fungsi program yang dirumuskan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program-program yang direncanakan. Oleh karena itu, tingkat kompetensi pegawai dalam pembagian tugas harus dapat terprioritaskan. Dengan kata lain unsur yang penting dalam teori efektivitas adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal. Tujuan itu tidak lain adalah harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Dengan demikian perumusan tujuan dan proses mencapai tujuan itu melibatkan berbagai komponen, antara lain tenaga, sarana dan prasarana, serta waktu dalam upaya melaksanakan peningkatan kesehatan bagi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kabupaten Pangandaran.

Sehingga dalam pelaksanaan Peranan Tenaga Pelaksana Desa dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat terlaksana dengan maksimal. Lebih lanjut dari hasil observasi penulis dapat dikatakan bahwa peranan Tenaga Pelaksana Desa masih kurang maksimal masih banyak pelaksana kerja yang kurang menguasai bidang keilmuan yang akan diinformasikan sehingga pada saat akan memaparkan cenderung hanya memberikan informasinya tidak secara jelas.

2) Hambatan-hambatan yang ditemui TPD (Tenaga Penggerak Desa) dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Pelaksanaan peningkatan kesehatan alat reproduksi bagi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran perlu mendapat perhatian yang maksimal disebabkan masih banyak hal yang perlu untuk ditingkatkan lagi berkenaan dengan pelaksanaan kerja adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksana Tenaga Penggerak Desa dalam menjalankan kerja di lapangan hal tersebut diindikasikan dengan masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran kerja yang dilakukan misalnya pelaksana datang terlambat dari waktu yang sudah disepakati dengan tim pengajar, hal tersebut menimbulkan kesan kurang baik terhadap pelaksana Tenaga Penggerak Desa di lapangan, selain itu bahwa penguasaan keilmuan Tenaga Penggerak Desa masih harus ditingkatkan lagi karena setiap sosialisasi yang dilakukan terkadang hanya satu orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja pegawai Tenaga Penggerak Desa di dalam mengimplementasikan tugas serta fungsinya di lapangan penulis identifikasi bahwa yang menjadi masalah penting adalah berkenaan dengan koordinasi dan inovasi kerja yang dilakukan pegawai Tenaga Penggerak Desa. Kedua hal tersebut memberikan dampak kurang baik

terhadap keterlaksanaan fungsi kerja pegawai Tenaga Penggerak Desa, dimana dapat diindikasikan dengan lemahnya proses tersebut memberikan dampak kurang baik pada keseluruhan proses kerja yang dilaksanakan pegawai Tenaga Penggerak Desa dan stakeholder pada khususnya serta minimnya tingkat antusiasme menjadi lebih kurang bahkan bukan tidak mungkin ketiadaan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi sesuatu yang pasti mungkin terjadi.

Dapat disimpulkan penulis bahwa dari hasil wawancara dan observasi penulis berkenaan dengan pelaksanaan peran Tenaga Penggerak Desa peningkatan kesehatan alat reproduksi bagi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang menjadi hambatan paling banyak disoroti adalah berkenaan dengan buruknya tingkat koordinasi dan rendahnya inovasi kerja pegawai Tenaga Penggerak Desa, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Minimnya pola kerja yang dilaksanakan oleh pegawai Tenaga Penggerak Desa, diindikasikan dengan tidak adanya pemanfaatan media elektronik dalam proses pelaksanaan kerjanya. Pola kerja pegawai Tenaga Penggerak Desa hanya terpaku pada pola kerja yang sebelumnya dilaksanakan.
2. Masih rendahnya koordinasi yang terlaksana diantara pimpinan dan pegawai berkenaan dengan tugas dan fungsi kerja yang semestinya dilakukan pegawai Tenaga Penggerak Desa.
3. Belum maksimalnya dalam pelaksanaan pembagian tugas kerja secara professional kepada pegawai.
4. Inovasi dalam pelaksanaan sosialisasi, masih rendahnya

pelaksanaan sosialisasi dapat diindikasikan dengan jaranginya pemanfaatan media online atau media elektronik dalam mendukung upaya sosialisasi yang dilakukan Tenaga Penggerak Desa.

5. Rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan terhadap Tenaga Penggerak Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan, memberikan persepsi kurang baik dalam rangka menciptakan tujuan organisasi BKKBN Kabupaten Pangandaran dalam mensosialisasikan arti penting kesehatan alat reproduksi pada pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan oleh TPD (Tenaga Penggerak Desa) dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan bahwa upaya dalam rangka meningkatkan peran pegawai Tenaga Penggerak Desa dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Keterlaksanaan pelaksanaan kerja yang dilakukan Tenaga Penggerak Desa hendaknya dapat lebih memanfaatkan sarana media pendukung seperti media online atau sarana lainnya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai media pendukung

dalam pelaksanaan sosialisasi maupun koordinasi yang dilakukan kepada stakeholder.

2. Melakukan koordinasi secara intensif dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya para tokoh masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat yang secara tidak langsung dalam mengintensifkan fungsi pelayanan Tenaga Penggerak Desa di Desa Pananjung Kabupaten Pangandaran.
3. Keterlaksanaan pembagian tugas kepada Tenaga Penggerak Desa hendaknya dapat dilaksanakan dengan profesional dengan mempertimbangkan tingkat kualifikasi akademik dan pengalaman. Hal tersebut dilakukan agar pegawai di dalam pelaksanaan kerjanya tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder.
4. Melakukan inovasi kebijakan, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan MOU (perjanjian) dengan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam bidang media elektronik atau media lainnya.
5. Memberikan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan yang ketat terhadap keterlaksanaan pelaksana di lapangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerja pegawai Tenaga Penggerak Desa, kemudian melakukan evaluasi kerja secara intensif dengan seluruh pelaksana sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksana di lapangan serta untuk mengefektifkan pola kerja pelaksana agar lebih efektif.

Dari paparan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan peranan Tenaga Penggerak Desa dalam

upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara efektif dapat dilaksanakan dengan lebih mengintensifkan pembinaan secara berjenjang kepada seluruh pelaksana Tenaga Penggerak Desa, mengoptimalkan sarana dan prasarana, kemudian melibatkan peran *stakeholder* (tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kredibel) dalam meningkatkan pemahaman pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berkenaan dengan penggunaan alat kontrasepsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi di Desa Pananjung Kabupaten Pangandaran mengenai "Pelaksanaan Peranan Tenaga Pelaksana Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Alat Reproduksi Pasangan Usia Subur" dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peranan Tenaga Pelaksana Desa dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara bahwa indikator seperti keterlaksanaan pedoman pelaksanaan kerja, pembagian kerja yang efektif, pelaksanaan sosialisasi koordinasi dan adanya kerjasama dengan *stakeholder* dapat dilaksanakan masih kurang maksimal kemudian tingkat pemahaman dan antusiasme masyarakat/keluarga serta keefektifan pelaksanaan program

dapat dikatakan sudah baik. Lebih lanjut dari hasil observasi penulis dapat dikatakan bahwa peranan Tenaga Pelaksana Desa masih kurang maksimal masih banyak pelaksana kerja yang kurang menguasai bidang keilmuan yang akan diinformasikan sehingga pada saat akan memaparkan cenderung hanya memberikan informasinya tidak secara jelas.

2. Bahwa pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran hambatan-hambatan yang ditemui oleh Tim Tenaga Pelaksana Desa sebagaimana hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut : masih lemahnya pendelegasian wewenang pimpinan kepada pelaksana, masih kurang efektifnya jalinan komunikasi antara pimpinan dan pelaksana di lapangan, tingkat kedisiplinan yang kurang baik, serta yang paling hambatan paling besar yaitu berkenaan dengan masalah rendahnya tingkat koordinasi dan minimnya inovasi kebijakan yang diambil terkait dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan.
3. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan Tenaga Pelaksana Desa dalam upaya peningkatan kesehatan alat reproduksi pasangan usia subur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dari hasil wawancara dan observasi penulis disimpulkan sebagai berikut : melakukan pendekatan-pendekatan secara aktif

baik terhadap pegawai maupun stakeholder lain sebagai salah satu upaya untuk mengintensifkan pola kerja pegawai Tenaga Pelaksana Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan serta meningkatkan inovasi kerja secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Atmodiwirio,S. 2007. *Manajemen Pelatihan*. Jakarta : Aedadizya Jaya.

Ari Kuncoro. 2007. *Informasi Dasar Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta : Airlangga.

Fathonah Siti. 2012. *Penggerak Buku Pegangan Tenaga Desa/Kelurahan*. Bandung : Gramedia.

Fathonah Siti. 2012. *Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Program KKB Bagi Tenaga penggerak desa/Tenaga penggerak Kelurahan(TPD/TPK)*. Bandung : Gramedia.

Moh. Arsyad. 2009. *Informasi Gerakan KB Nasional Selama Pembangunan Jangka Panjang*. Jakarta : Airlangga.

Syarief Sugiri. 2007. *KB Untuk Semua*. Jakarta : Gramedia.

Soekamto. 2008. *Subsistem Pendidikan dan Pelatihan Program KB Nasional*. Jakarta : BKKBN.

Sumber Perundang - Undangan :

Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Peraturan 62 tahun Presiden Nomor 2010 tentang Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Wajib BKKBN.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.